



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

INDONESIA MENUJU SWASEMBADA BERAS

Sony Hendra Permana
Analisis Legislatif Ahli Madya
sony.hendra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia menunjukkan progres signifikan dalam upaya mencapai swasembada beras pada tahun 2025. Klaim ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pada 13 November 2025, yang menyebutkan bahwa Indonesia telah mencapai 99 persen swasembada dan berhasil menghentikan total impor beras. Dengan sisa waktu satu bulan di tahun 2025, optimisme untuk mencapai swasembada penuh di akhir tahun dapat terwujud, seiring dengan proyeksi produksi beras yang meningkat cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional periode Januari–Desember 2025 akan mencapai 34,77 juta ton. Angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 4,14 juta ton atau 13 persen dibandingkan tahun 2024, tetapi juga melampaui proyeksi kebutuhan konsumsi nasional yang berada di angka 30,97 juta ton. Capaian produksi ini mengindikasikan adanya potensi surplus beras nasional sebesar 3,8 juta ton pada akhir tahun 2025.

Peningkatan produksi beras yang signifikan ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu ekspansi lahan dan intervensi kebijakan yang strategis. Dari sisi lahan, BPS mencatat adanya peningkatan potensi luas panen padi sepanjang tahun 2025 mencapai 11,35 juta hektare, atau tumbuh 12,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan luas panen ini berjalan beriringan dengan implementasi berbagai program Kementerian Pertanian yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Strategi tersebut mencakup langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi seperti optimalisasi lahan, program cetak sawah baru, dan pompanisasi. Selain itu, perbaikan infrastruktur irigasi, modernisasi pertanian, serta kebijakan yang berpihak pada petani—melalui penetapan harga gabah yang menguntungkan dan alokasi pupuk bersubsidi—turut menjadi pendorong utama tercapainya target produksi tahun ini.

Keberhasilan di sisi hulu produksi ini berdampak langsung pada stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen. Stok beras yang dikelola oleh BULOG dilaporkan berada di angka 3,8 juta ton. Jumlah stok ini diprediksi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Stabilitas pasokan ini berkorelasi positif dengan stabilitas harga di pasar. Berdasarkan pantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 8 November 2025, rata-rata harga beras medium di seluruh zona wilayah Indonesia (Zona 1, 2, dan 3) terpantau berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Rerata harga beras medium di Zona 1 berada di Rp13.233 per kilogram (kg), Zona 2 di Rp13.633 per kg, dan Zona 3 di Rp15.453 per kg. Sementara HET beras medium untuk Zona 1 Rp13.500 per kg, Zona 2 Rp14.000 per kg, dan Zona 3 Rp15.500 per kg. Bahkan, data menunjukkan bahwa harga beras cenderung mengalami penurunan di 214 kabupaten/kota memasuki bulan November, menandakan pasokan yang terkendali dengan baik di seluruh wilayah.

Kebijakan pemerintah untuk fokus pada penguatan produksi dalam negeri dan menghentikan impor beras tidak hanya berdampak pada stabilitas domestik, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pasar global. Keputusan Indonesia untuk tidak lagi mengimpor beras sejak diumumkan pada Desember 2024 telah berkontribusi pada penurunan harga beras global. Tercatat harga beras di pasar dunia telah turun dari kisaran 650 dolar AS per ton pada tahun lalu menjadi 371 dolar AS per ton saat ini. Fenomena ini juga tercermin dalam Indeks

Harga Beras Food and Agriculture Organization (FAO *Rice Price Index*/FARPI), yang menunjukkan penurunan 1,2 persen menjadi 119,2 poin pascapengumuman penghentian impor oleh Indonesia, dan terus menurun hingga mencapai 100,9 poin pada September 2025. Dengan demikian, Indonesia memiliki posisi yang krusial karena adanya kebijakan perberasan nasional memengaruhi pergeseran keseimbangan pasar global.

Atensi DPR

Capaian produksi beras saat ini yang meningkat secara signifikan, cukup memberikan optimisme tinggi bahwa swasembada beras dapat diwujudkan diakhir tahun 2025. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian yang besar bagi DPR RI, khususnya Komisi IV. Dalam fungsinya di bidang pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program di lapangan, seperti pompanisasi dan perbaikan irigasi, agar tepat sasaran. Selain itu, Komisi IV DPR RI juga perlu memastikan ketersediaan stok BULOG sebesar 3,8 juta ton berada dalam kondisi yang baik di dalam pengelolaannya. Dalam fungsinya di bidang anggaran, Komisi IV DPR RI perlu mendukung alokasi APBN yang memadai bagi Kementerian Pertanian dan mitra kerja lainnya yang terkait untuk melanjutkan program intensifikasi, modernisasi pertanian, dan cetak sawah, demi mengamankan keberlanjutan swasembada beras nasional. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penguatan substansi terkait swasembada pangan dapat menjadi salah satu aspek yang dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025.

Sumber

antaranews.com, 13 November 2025;
badanpangan.go.id, 13 November 2025;
pertanian.go.id, 3 dan 17 November 2025;
republika.co.id, 5 November 2025;
rri.co.id, 13 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R
Anugrah Juwita S

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*